

# BAB 7

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi 2011-2016, sebagai berikut:

### 7.1. FOKUS BERDASARKAN MISI

- 1 Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan, dengan fokus :
  - a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan, pemanfaatan transportasi sungai, pelabuhan serta infrastruktur Listrik.
  - b. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan mewujudkan tersedianya Air Bersih layak minum.
  - c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ekonomi seperti pasar, tempat pelelangan dan infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.
- 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas, dengan fokus :
  - a. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas

- b. Pemerataan jangkauan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas
  - c. Peningkatan pendidikan gratis yang berkualitas terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dari tingkat SD sampai SLTA..
  - d. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidikan kejuruan, terutama pendidikan kelautan dan perikanan serta pengembangan ternak.
  - e. Peningkatan Kualitas Layanan dan akses perpustakaan di semua wilayah dan lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional, dengan fokus :
- a. Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik
  - b. Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum
  - c. Mendorong pelaksanaan anggaran yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja pada semua SKPD dan level Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  - d. Peningkatan kompetensi birokrasi sehingga dapat bekerja lebih profesional.
  - e. Peningkatan Kesetaraan Gender
4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa, dengan fokus :
- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian perkebunan, perikanan, perikanan dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan
  - b. Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan
  - c. Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing
  - d. Pengembangan usaha agroindustri
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas) dengan fokus:

- a. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan kesemua wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang prima bagi semua penduduk.
  - c. Meningkatkan pelayanan berobat gratis yang berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan.
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat, program ini fokus pada:
- a. Identifikasi permasalahan sengketa lahan yang terjadi di semua Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - b. Membantu dan memfasilitasi permasalahan sengketa lahan yang terjadi ditengah masyarakat terutama permasalahan sengketa lahan dengan perusahaan.
  - c. Menyelesaikan dengan cepat penyelesaian sengketa lahan dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku.
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional, dengan fokus :
- a. Penataan kembali zonasi dan perlindungan kawasan konservasi dengan tegas dan konsisten berdasarkan hukum untuk menjaga lingkungan hidup yang baik.
  - b. Penataan dan perlindungan terhadap peninggalan budaya dan situs baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam proses..
  - c. Peningkatan dan pengembangan budaya tradisional melalui berbagai kegiatan, kajian dan event yang mendorong pengembangan budaya.
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan fokus:
- a. Peningkatan peran agama dalam mendorong kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang lebih dinamis.
  - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

- c. Meningkatkan toleransi beragama yang lebih harmonis ditengah masyarakat.
- 9. Meningkatkan saran dan prasarana olah raga dan pembinaan atlit untuk berprestasi, dengan fokus:
  - a. Membangun fasilitas olahraga yang repressentatif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olah raga.
  - b. Meningkatkan pencarian atlit olah raga yang berbakat terutama di tingkat SD, SMP dan SLTA.
  - c. Meningkatkan pembinaan atlit untuk berprestasi dan bagi yang berprestasi diberikan bea siswa sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
  - d. Peningkatan Peran Pemuda untuk mendorong Prestasi Olahraga

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

## **7.2. PROGRAM BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN**

- 1. Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama yakni mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Urusan Wajib Penataan Ruang**, melalui program antara lain:
    - (1) Program Perencanaan Tata Ruang, disesuaikan dengan Provinsi.
    - (2) Program Penataan Kawasan, disesuaikan dengan Provinsi.
  - b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Pengairan)**, melalui program antara lain:
    - (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
    - (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa.
    - (3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air Tanah.

- (4) Program Pengendalian Banjir.
- (5) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong.
- c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya),** melalui Program antara lain :
  - (1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
  - (2) Program Pengembangan Perumahan.
  - (3) Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
  - (4) Program Pembangunan Saluran Drainase.
  - (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- d. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga),** melalui program antara lain:
  - (1) Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Dermaga.
  - (2) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan.
  - (3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
  - (4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - (5) Program Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan
- e. Urusan Wajib Perhubungan,** melalui program antara lain :
  - (1) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
  - (2) Program Pengembangan Transportasi Pedesaan.
  - (3) Program Pengembangan Terminal dan Dermaga Terpadu.
  - (4) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
  - (5) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- f. Urusan Pilihan Ketransmigrasian,** melalui program antara lain :
  - (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
  - (2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- g. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral,** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Potensi dan Kecukupan Energi Listrik dan Bahan Bakar
  - (2) Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan.
2. Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua, yakni meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas); maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Urusan Wajib Pendidikan** melalui program antara lain :
    - (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
    - (2) Program Wajib Belajar 12 tahun.
    - (3) Program Pendidikan Menengah.
    - (4) Program Pendidikan Non-Formal.
    - (5) Program Pendidikan Luar Biasa.
    - (6) Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
    - (7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
  - b. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga**, melalui program antara lain:
    - (1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.
    - (2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
    - (3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
    - (4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.
    - (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
    - (6) Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Olah Raga.
    - (7) Program Data Base Kepemudaan dan Keolah Ragaan.
  - c. Urusan Wajib Perpustakaan**, melalui program antara lain :
    - (1) Program Pengembangan Budaya Membaca dan Pembinaan Perpustakaan.
    - (2) Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Pustaka

3. Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sdm propesional", maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

**a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** melalui program antara lain :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- (4) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.
- (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- (7) Program Pendidikan Kedinasan.
- (8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
- (9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- (11) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (12) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (13) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (14) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- (15) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan.
- (16) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- (17) Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- (18) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- (19) Program Pendataan dan Pembinaan PNS

- (20) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- (21) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- (22) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum
- (23) Program Perencanaan dan Perbantuan Hukum
- (24) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- (25) Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
- (26) Program Penelitian dan Pengembangan.
- (27) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
- (28) Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi
- (29) Program Pembinaan dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial
- (30) Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan SDA
- (31) Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS

**b. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika** melalui program antara lain :

- (1) Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- (4) Program Pengembangan Pemetaan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- (5) Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

**c. Urusan Wajib Kearsipan** dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.



**d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri** dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Program Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin kokoh.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- (4) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- (5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

**e. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- (4) Program Keluarga Berencana
- (5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

**f. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
- (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- (4) Program Penerapan Pemerintahan yang baik.
- (5) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Desa
- (6) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PAUD

4. Misi keempat, “Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya”, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
- (2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- (4) Program Pengembangan Kemitraan.
- (5) Program Perkuatan Permodalan UMKMK.
- (6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK.
- (7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif.
- (8) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKM

**b. Urusan Wajib Penanaman Modal,** melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- (3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

**c. Urusan Wajib Ketenagakerjaan,** melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

**d. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan,** melalui program antara lain:

- (1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
  - (4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
  - (5) Program Pengembangan Data dan Informasi.
  - (6) Program peningkatan kapasitas kelembangaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - (7) Program Kerjasama Pembangunan
  - (8) Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, melalui program antara lain:
- (1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.
- f. Urusan Pilihan Industri**, melalui program antara lain:
- (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
  - (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
  - (3) Program Penataan Struktur Industri
- g. Urusan Pilihan Perdagangan**, melalui program antara lain :
- (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
  - (2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
  - (3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
  - (4) Program Pengembangan Standarisasi Nasional.
- h. Urusan Pilihan Pariwisata**, melalui program antara lain :
- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
  - (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
  - (3) Program Pengembangan Kemitraan.
- i. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura)**, melalui program antara lain:
- (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
  - (2) Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis.
  - (3) Program Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian.
- j. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan)** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
  - (2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
  - i. **Urusan Pilihan Pertanian (Pternakan)**, melalui program antara lain :
    - (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pternakan.
  - k. **Urusan Pilihan Kehutanan**, melalui program antara lain :
    - (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Kehutanan.
  - l. **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan** dengan program sebagai berikut:
    - (1) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
    - (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
    - (3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  - m. **Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral** dengan program sebagai berikut:
    - (1) Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan Energi
    - (2) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Wilayah Tambang.
5. Dalam upaya mewujudkan misi kelima yakni "Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas)", maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- Urusan Wajib Kesehatan melalui program antara lain :**
- a. **Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.**
  - b. **Program Upaya Kesehatan Masyarakat.**
  - c. **Program Pengawasan Obat dan Makanan.**
  - d. **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.**
  - e. **Program Perbaikan Gizi Masyarakat.**
  - f. **Program Pengembangan Lingkungan Sehat.**
  - g. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.**

- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
- j. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- k. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- m. Program Upaya Kesehatan Perorangan.
- n. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- o. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
- p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata.
- q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

6. Dalam upaya mewujudkan misi keenam yakni " Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat", maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan melalui program antara lain:**

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
- b. Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- e. Program Pembinaan Anak Terlantar.
- f. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- g. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
- h. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
- i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- j. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

7. Dalam upaya mewujudkan misi ketujuh yakni ” Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.”, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan melalui program antara lain :**

- (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.**
- (2) Program Lumbung Pangan.**

**b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga) melalui program antara lain :**

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**

**c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup melalui program antara lain :**

- (1) Program Pengendalian dan Pengrusakan Lingkungan.**
- (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.**
- (3) Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA**
- (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH**

**d. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain**

- (1) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.**
- (2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.**
- (3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.**
- (4) Program Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana Pertanian**

**e. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan), melalui program antara lain :**

- (1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan.**
- (2) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan.**
- (3) Program Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan.**

- (4) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan .
  - (5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
  - (6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
- f. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan), melalui program antara lain :**
- (1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
  - (2) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak.
  - (3) Program Penerapan Teknologi Peternakan.
  - (4) Program Pengembangan Peternakan.
  - (5) Program Peningkatan Fungsi Kesmavet
- h. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain :**
- (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
  - (2) Program Kemitraan .
  - (3) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
  - (4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi.
  - (5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  - (6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa.
- i. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, melalui program antara lain :**
- (1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya.
  - (2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
  - (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- j. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain :**
- (1) Program Pengembangan Energi.

- (2) Program Survei Geologi dan Sumberdaya Mineral, Mitigasi Bencana Alam Geologi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral.
- (3) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
- (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan dan Pertambangan.
- (5) Program Pembinaan dan Pengawasan K3 Pertambangan.
- (6) Program Pengembangan Sumur Tua dan Pengusahaan Migas.
- (7) Program Pengembangan Potensi Energi Lokal/Desa.

8. Dalam upaya mewujudkan misi kedelapan yakni " Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi", maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan melalui program antara lain:**

- (1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
- (2) Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- (3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- (4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Program Pembinaan Anak Terlantar.
- (6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- (7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
- (8) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
- (9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- (10) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.



**b. Urusan Wajib Kebudayaan melalui program antara lain:**

- (1) Program Pengembangan Nilai Budaya.**
- (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.**
- (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.**
- (4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.**

**c. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui program antara lain :**

- (1) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.**
- (2) Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi.**
- (3) Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.**

9. Dalam upaya mewujudkan misi sembilan yakni " Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi", maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga, melalui program antara lain:**

- a. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.**
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.**
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.**
- d. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.**
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.**
- f. Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Olah Raga.**
- g. Program Data Base Kepemudaan dan Keolah Ragaan.**

### **7.3. PROGRAM LINTAS BIDANG DAN LINTAS SKPD**

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Tanjung Jabung Timur 2011-2016, selain program-program yang berdasarkan urusan diatas, juga ditetapkan program dan kegiatan baik lintas SKPD maupun lintas sektoral yang nantinya akan diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan
2. Program Pencapaian MDGs
3. Program Satu Komoditas, Satu Pengusaha dan Satu Koperasi/ Lembaga Keuangan Mikro Lainnya
4. Pengembangan kawasan konservasi.
5. Pembangunan industri agro hilir.
6. Pengembangan Pelabuhan Laut
7. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik Berorientasi Pasar Tenaga Kerja.
8. Pengembangan BUMD dengan pendekatan synergisitas
9. Pengembangan Sentra Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Berorientasi Pasar Tenaga Kerja.
10. Pembangunan Sport Center

#### **7.4. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN INFRASTRUKTUR EKONOMI, PERTANIAN DAN PEDESAAN**

##### **1. Program pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi (pasar, perbankan, terminal agribisnis dan pasar kalangan)**

Penyediaan kebutuhan infrastruktur ekonomi seperti pasar, perbankan, terminal agribisnis dan pasar kalangan merupakan faktor yang sangat penting untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Untuk itu beberapa kegiatan pembangunan akan dilakukan antara lain:

- a. Perencanaan dan pembangunan pasar terutama di pedesaan
- b. Perencanaan dan pembangunan terminal agribisnis

- c. Perencanaan dan pembangunan pasa kalangan
- d. Perencanaan dan pembangunan Bank terutama di pedesaan
- e. Perencanaan dan pembangunan lembaga keuangan lain

## **2. Program pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian (Pengembangan waduk dan irigasi)**

Pertanian merupakan sektor yang paling banyak melibatkan penduduk di Indonesia termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian menjadi suatu yang sangat penting. Nilai penting dari program ini tidak hanya karena akan memberikan kontribusi positif bagi banyak masyarakat Tanjung Jabung Timur tetapi juga akan membantu program ketahanan pangan. Oleh karenanya pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian diutamakan untuk menunjang pertanian tanaman pangan terutama padi. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a. Perencanaan dan pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi
- b. Perencanaan dan pembangunan waduk/embung
- c. Perencanaan dan pelaksanaan normalisasi saluran sungai
- d. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

## **3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan**

Kawasan perdesaan biasanya ditandai oleh kurangnya infrastruktur transportasi, pendidikan, ekonomi, air bersih, listrik dan komunikasi. Akibatnya masyarakat yang hidup di perdesaan akan tertinggal hampir dalam semua hal. Dalam hal ekonomi masyarakat di perdesaan menanggung rente ekonomi yang sangat tinggi. Petani yang umumnya tinggal di perdesaan dengan produk pertanian akan menempati strata paling bawah dalam rantai pemasaran sehingga harga jualnya akan sangat murah. Harga ini akan semakin rendah sejalan dengan penambahan rantai pemasaran. Sementara petani dalam tata niaga produk hasil industri yang merupakan kebutuhan masyarakat di perdesaan menempati strata tertinggi yang artinya harga belinya

merupakan harga tertinggi. Harga ini akan semakin bertambah sejalan dengan penambahan rantai pemasaran.

Untuk memangkas kondisi ini maka pembangunan infrastruktur terutama transportasi merupakan program yang sangat penting untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dalam program pembangunan infrastruktur perdesaan adalah:

- a. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
- b. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
- c. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
- d. Pembangunan pasar perdesaaan
- e. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
- f. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
- g. Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaaan

#### **4. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**

Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru perlu dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengembangan kawasan ini akan membantu mempercepat proses pembangunan terutama pada kawasan terpencil dengan biaya pembangunan yang terbatas. Kawasan pertumbuhan harus dipilih secara cermat, salah satu kriteria yang dapat dipilih adalah berada diantara kawasan yang belum berkembang.

Untuk menunjang pengembangan kawasan ini diperlukan pembangunan jaringan infrastruktur yang memadai. Jaringan tersebut meliputi jaringan jalan di dalam kawasan dan jalan penghubung dengan daerah sekitarnya; sarana ekonomi seperti pasar, koperasi dan perbankan; fasilitas listrik dan komunikasi; sarana pendidikan dan kesehatan; jaringan perumahan dan air bersih dan lain-lain. Adapun kegiatan pembangunan yang akan dilakukan adalah:

- a. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur
- b. Perencanaan dan pembangunan/pengembangan jalan dan jembatan

- c. Perencanaan dan pembangunan/pengembangan jaringan listrik dan telekomunikasi
- d. Perencanaan dan pembangunan/pengembangan fasilitas air bersih/minum
- e. Perencanaan dan pembangunan/pengembangan fasilitas kesehatan
- f. Perencanaan dan pembangunan/pengembangan fasilitas pendidikan
- g. Perencanaan dan pembangunan/pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat

## **7.5. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN PERTANIAN**

### **7.5.1. Pembangunan Pertanian**

#### **7.5.1.1. Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai potensi yang besar pada sektor pertanian. Untuk mendukung sektor ini kebijakan umum pembangunan pertanian di Kabupaten Tanjung Timur adalah: i) Mengembangkan komoditi berbasis lokal, ii) Mengembangkan sektor produksi, iii) Pengembangan kawasan sektor pertumbuhan, dan iv) Melanjutkan kebijakan Pemerintah dalam bidang Pertanian khususnya perlindungan lahan tanaman pangan berkelanjutan (LKPJ 2006 – 2011).

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai Tahun 2010 dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi adalah antara lain sebagai berikut:

- 1). Kondisi lahan gambut membutuhkan biaya yang besar untuk pembukaan dan penyiapan lahannya, sementara standar harga bibit maupun biaya penanaman yang dibuat oleh pusat sebagai ancar-ancur kurang memperhatikan kondisi lokal setempat sehingga akibatnya terjadi ketimpangan antara biaya rehabilitasi di daerah darat dengan di daerah yang berawa;

- 2). Selama ini petani telah terbiasa menerima bantuan dari atas (Instansi Pemerintah) sehingga kurangnya rasa memiliki bahkan tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali terhadap beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas;
- 3). Keterbatasan SDM aparat atau petugas baik jumlah maupun kuantitas;
- 4). Beredarnya bibit tanaman perkebunan terutama kelapa sawit yang tidak memenuhi standar mutu bibit;
- 5). Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan fungsi hutan lindung gambut masih kurang;
- 6). Masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan karena permasalahan modal dan jenis tanaman yang cocok ditanam dilahan yang berawa gambut dan kepastian pasar.

#### **7.5.1.2. Program Kerja Pembangunan Pertanian**

Pembangunan pertanian dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi pertanian dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terjaganya tingkat produksi beras dengan tingkat ketersediaan surplus untuk pemenuhan kebutuhan lokal.
- b. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras.
- c. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dengan harga terjangkau.
- d. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi masyarakat terhadap protein hewani.
- e. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi.
- f. Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan.
- g. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan serta peternakan.

Program pembangunan dalam upaya revitalisasi pertanian dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

## **1. Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi:

- a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
- b. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
- c. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- d. Pengembangan perbenihan perbibitan
- e. Peningkatan mutu dan ketahanan pangan
- f. Pengembangan pengelolaan lahan dan air
- g. Penyusunan data base potensi produk pangan
- h. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis lokal.
- i. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija dan diversifikasi tanaman.
- j. Peningkatan pasca panen, pengolahan hasil dan diversifikasi pangan.
- k. Analisis dan penyusunan pola konsumsi, suplai pangan dan kebutuhan pangan.
- l. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat dan harga pangan pokok.
- m. Pengembangan desa mandiri pangan dan lumbung pangan desa
- n. Penanganan daerah rawan pangan
- o. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
- p. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
- q. Penyuluhan sumber pangan alternatif

## **2. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Hasil Peternakan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

- a. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
- b. Pengembangan benih/bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura
- c. Penyusunan kebijakan alih fungsi lahan Pertanian

- d. Sertifikasi Benih/Bibit unggul pertanian/perkebunan
- e. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- f. Perencanaan, pelaporan dan pendataan statistik pertanian/perkebunan
- g. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
- h. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- i. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
- j. Pengembangan agribisnis peternakan
- k. Pembelian obat-obatan ternak
- l. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan peternakan
- m. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dan peternakan
- n. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

### **3. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**

- a. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
- b. Pelatihan pengembangan teknologi tepat guna
- c. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan
- d. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
- e. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

### **4. Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan**

- a. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan
- b. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat Guna
- c. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- d. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
- e. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
- f. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna



- g. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
- h. Pengembangan kawasan sentra peternakan dan integrasi ternak sawit
- i. Pengembangan Pengelolaan padang penggembalaan ternak, Kebun hijauan makanan ternak.

**5. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**

- a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
- b. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
- c. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

**6. Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**

- a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
- b. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
- c. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
- e. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
- f. Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
- g. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan dan perikanan masyarakat yang akan dipasarkan
- h. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan
- i. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan

**7. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**

- a. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
- b. Peningkatan kesejahteraan petani
- c. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- d. Pekan Nasional (PENAS)
- e. Fasilitasi Kerjasama regional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
- g. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi peternakan
- h. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
- i. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
- j. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
- k. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
- l. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan

#### **8. Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan**

- a. Penyuluhan dan pendampingan bagi petani
- b. Peningkatan keterampilan penyuluh pertanian
- c. Pemberdayaan KPPK dan demplot Lidah Buaya/Melon
- d. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
- e. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian
- f. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian

#### **9. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

- a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
- b. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)

**10. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan**

- a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
- b. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- c. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut dan Suaka Perikanan

**11. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendencygunaan Sumberdaya Laut**

- a. Pengawasan Penangkapan Ikan di Laut dan Perairan Umum
- b. Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan

**12. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut**

- a. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut
- b. Pengembangan Data Spasial Wilayah Pesisir dan Laut
- c. Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

**13. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan wawasan Maritim kepada Masyarakat**

- a. Bersih Laut
- b. Penyuluhan budaya kelautan

**14. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

- a. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)
- b. Pengembangan Budidaya Keramba
- c. Pengembangan Dana Penguatan Modal (DPM)
- d. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

**15. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

- a. Pengembangan PPI di Muara Sabak
- b. Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap
- c. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
- d. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap

**16. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan**

- a. Pelatihan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Wanita Tani Nelayan
- b. Pengembangan Demplot Budidaya Ikan
- c. Kajian sistem penyuluhan perikanan

**17. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

- a. Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
- b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin Bidang Perikanan
- c. Pelatihan Pengolahan dan Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan
- d. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

**18. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar**

- a. Pengembangan Kawasan Budidaya Tambak
- b. Pengembangan Kawasan Budidaya Kolam
- c. Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

**19. Program Peningkatan Konsumsi Ikan**

- a. Pengembangan Budidaya Ikan Nila di Tambak
- b. Pengembangan Budidaya Ikan Pada Lahan Pekarangan
- c. Pengembangan Budidaya Ikan Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Non Formal/P2WKSS
- d. Lomba Masakan Serba Ikan/Gemar Makan Ikan

### 7.5.2. Peningkatan Daya Saing Agroindustri

Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan daya saing agro-industri adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan.
- b. Berkembangnya industri pengolahan (agroindustri) sekaligus memanfaatkan secara optimal produk utama dan *by product* hasil pertanian.
- c. Meningkatnya nilai tambah yang diterima oleh masyarakat pertanian sebagai dampak proses pengolahan terhadap hasil-hasil pertanian dari bahan primer menjadi bahan jadi atau setengah jadi;
- d. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari industri primer ke agro-industri dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- e. Berkembangnya “Workshop” industri penunjang yang menghasilkan alat-alat panen, pasca panen dan alat-alat pengolahan serta komponen pendukung lainnya.
- f. Meningkatnya volume ekspor produk agro-industri dari total ekspor keseluruhan, terutama pada produk ekspor agro-industri yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan.

### 1. Pengembangan Agribisnis

Program ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan produktivitas komoditi pertanian dalam arti luas, khususnya komoditi pertanian sebagai pendukung usaha agro-industri. (2) memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, *on farm*, hilir dan usaha jasa pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

- a. Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan pendukung usaha agro-industri sesuai dengan daya dukung wilayah;
- b. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan;

- c. Memberdayakan masyarakat pertanian dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pertanian;
- d. Mengembangkan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan internasional yang dapat dijadikan bahan baku usaha agro-industri;
- e. Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang agribisnis termasuk pengembangan lembaga informasi, penyuluhan, dan investasi.

## **2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja sektor pertanian (agroindustri) sehingga mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan industri. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan program-program pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh pertanian dibidang agroindustri;
- b. Menumbuhkembangkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat tani;
- c. Meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja yang mendukung agroindustri;

## **3. Peningkatan Standardisasi Produk Agro-Industri**

Program ini bertujuan untuk : (1) memperkuat daya saing produk-produk agro-industri, (2) meningkatkan kualitas produk-produk tersebut agar sesuai dengan permintaan pasar di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan pokok pada program di atas yang terkait dengan peningkatan standardisasi produk agro-industri terutama mencakup:

- a. Memperluas pemanfaatan dan penggunaan standardisasi produk agro-industri;
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan demonstrasi (praktek kerja/ lapangan) untuk mendapatkan produk yang sesuai standar yang diinginkan;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama untuk standar produk agro-industri.

#### 4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknologi bagi industri sehingga dapat meningkatkan produktivitas di sektor industri. Program peningkatan kemampuan teknologi bagi industri ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
- b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
- c. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
- d. Memperluas penerapan standar produk agro-industri yang sesuai (*compliance*) dengan standar pasar global;
- e. Mengembangkan klaster industri berbasis teknologi

Adapun program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang **SAMUDRA** dapat dilihat pada tabel 7.1. berikut :

**Tabel 7.1.**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				
MISI I : Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum Secara Merata dan Berkeadilan										
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian masyarakat hingga wilayah terpencil	1. Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	1. Pengembangan sarana-prasarana diorientasikan sesuai strategi pengembangan ekonomi wilayah serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum	1. Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produks serta meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi	Panjang Jalan Kabupaten	909,15 km	1000 km	1. Program pembangunan jalan dan jembatan.	Wajib	Dinas PU	
							2. Program peningkatan pelayanan angkutan.	Wajib	Dishubkominfo	
							3. Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan	Wajib	Dishubkominfo	
							4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Wajib	Dishubkominfo	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			2. Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan kecamatan dan desa-desa	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	20,61%	80,50%	1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Wajib	Dinas PU
			3. Meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar	Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	47,31% belum terhubung	100 % sentra produksi pertanian dan perikanan terhubung	1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Wajib	Dinas PU
		2. Aksesibilitas ke dan dari kabupaten Tanjung Jabung Timur harus terus dijamin dan ditingkatkan, tidak saja ke pusat ibukota Propinsi, tapi ke beberapa pusat	1. Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal	Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	Terbatasnya perhubungan perintis	Meningkatnya perhubungan perintis	1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Wajib	Dinas PU dan Dishubkominfo
			2. Pengembanagan prasarana transportasi yang	Panjang jalan	909,15 km	1000 km	1. Program pembangunan infrastruktur	Wajib	Dinas PU

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		perekonomian dan administrasi di wilayah yang lain	akan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi darat dan sungai				perdesaan		
				Jalan dalam kondisi Baik	20,61%	80,50%	1. Program pembangunan jalan dan jembatan	Wajib	Dinas PU
				Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut		70% telah direvitalisasi	1. Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan.	Wajib	Dishubkominfo
							1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Wajib	Dishubkominfo
							1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Wajib	Dishubkominfo
							1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Lingkungan Desa/Kelurahan	Wajib	BPMPDK
			3. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan	Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi		50% lebih rendah dari tahun 2011	1. Peningkatan pelayanan perhubungan	Wajib	Dishubkominfo

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan				1. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Wajib	Dishubkominfo
		3. Menekankan konsep agri bahari dalam pembangunan pedesaan	1. Pengembangan transportasi air (laut dan sungai) dengan memfokuskan pada pengembangan kapasitas pelabuhan serta pemeliharaan alur sungai.	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi sungai dan laut	Terbatas	50% lebih tinggi dibandingkan tahun 2011	1. Pembangunan jaringan transportasi laut dan sungai	Wajib	Dinas PU dan Dishubkominfo
		4. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan	1. Pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, poergudangan dan pengolahan hasil pertanian	Tersedianya infrastruktur pertanian yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Infrastruktur pertanian terbatas	Terpenuhinya infrastruktur pertanian	1. Program pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian	Pilihan	Dinas Hutbun, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			2. Pengembangan infrastruktur perikanan seperti fasilitas pelelangan ikan, pengolahan hasil perikanan dan pergudangan						
	2. Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	1. Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan listrik.	1. Pengembangan Energi Menciptakan alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	Terbatas	Meningkat 50% dari tahun 2011	1. Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pilihan	Dinas ESDM
			2. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan	Peningkatan rasio elektrifikasi	32,70%	85%	1. Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pilihan	Dinas ESDM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Pemenuhan kebutuhan air bersih yang merata	1. Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan		Terbatas	Meningkat 50% dari tahun 2011	1. Program pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Hutbun, Dinas PU
			2. Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	4,24%	68,87%	1. Program penyediaan dan pengelolaan air baku. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Wajib	Dinas PU
	3. Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	1. Menyediakan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian terutama tanaman pangan.	1. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi dengan menggunakan alat berat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	Terbatas	Meningkat 50% dari tahun 2011	1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Wajib	Dinas PU, Dinas Pertanian Tanaman Pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	4. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	1. Percepatan pembangunan jembatan yang menghubungkan Delta Berbak hingga Kawasan Ujung Jabung melalui <i>concurrent strategy</i> antara pemerintah pusat - provinsi - kabupaten	1. Membangun komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan provinsi dengan <i>inter-governmental networking policy</i>	Ada Komunikasi dua arah yang efektif	Tidak Efektif	Terselenggaranya komunikasi 2 arah yang efektif	1. Program pembangunan jalan dan jembatan.	Wajib	Dinas PU
	5. Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	1. Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi bagi seluruh lapisan masyarakat	1. Pengembangan Energi Menciptakan alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di perdesaan	Belum adanya energi terbarukan	Telah adanya energi terbarukan	1. Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pilihan	Dinas ESDM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			2. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan	Peningkatan rasio elektrifikasi	32,70%	85%	1. Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pilihan	Dinas ESDM
	6. Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	1. Memfasilitasi penyiapan lokasi sebagai kawasan ekonomi strategis	1. Menyempurnakan dan menyederhanakan pemberian izin usaha melalui sistem satu pintu.	Perizinan satu pintu	Izin satu pintu	Terstandarnya sistem perizinan	1. Program standarisasi pelayanan perizinan	Wajib	KPPT
			2. Memfasilitasi investor dalam kemudahan berusaha dan pembebasan lahan	adanya kemudahan berinvestasi		Kemudahan pemanfaatan lahan	1. Program penyediaan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.  2. Program penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Wajib  Wajib	Sekda  Sekda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Penyiapan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi strategis	1. Membantu menyiapkan master plan pendukung pengembangan Kawasan Ujung Jabung yang terintegrasi meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan.	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	Belum ada masterplan pendukung	Adanya masterplan pendukung	1. Program perencanaan tata ruang.	Wajib	Bappeda
			2. Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal	kawasan ekonomi strategis	terbatas	6 wilayah pertumbuhan	2. Program pemanfaatan ruang. 3. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Wajib Wajib	Bappeda Bappeda
							1. Program Pengembangan Kawasan budidaya air laut, payau dan air tawar	Pilihan	DKP



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	1. Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman.	1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman melalui bedah rumah	Persentase rumah sehat	87,60%	94,00%	1. Program Pengembangan Perumahan.	Wajib	Dinas PU,
							2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.	Wajib	Dinas PU
							3. Program pemanfaatan ruang.	Wajib	Dinas Tata Kota
							4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	Wajib	Dinas Tata Kota
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan, desa dan pesisir	Kualitas layanan	terbatas	Meningkat	1. Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan.	Wajib	Dinas PU
							2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	Wajib	Dinas Tata Kota

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			3. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat	Akses sanitasi layak	25,65%	65,50%	1. Program pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan lingkungan desa/kelurahan	Wajib	BPMPDK dan Dinas PU
			4. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat	Adanya pola kemitraan	tidak ada	ada kemitraaan	1. Program pengembangan kemitraan pembangunan perumahan	Wajib	Dinas PU

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			PENANGGUNGJAWAB
MISI II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dengan Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Terampil dan Siap Pakai (Pendidikan Gratis Berkualitas )									
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	1. Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	1. Peningkatan penataan sistem pelayanan pendidikan untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional	1. Meningkatkan kualitas pendidikan gratis untuk tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat	Angka Rata-rata lama sekolah	5,85 Tahun	8,25 Tahun	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini.	Wajib	Dinas Pendidikan
							2. Program Pendidikan Menengah	Wajib	Dinas Pendidikan
				Angka melek huruf	90,82%	95,85%	1. Program Wajib Belajar 9 tahun	Wajib	Dinas Pendidikan
				APK SMA/Sederajat	70,62	85,75	1. Program Pendidikan Non-Formal	Wajib	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)		Meningkat 50% dari tahun 2011	1. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Wajib	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya kualitas belajar dan mengajar, serta pengelolaan pendidikan		Meningkat 50% dari tahun 2011	1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib	Dinas Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Wajib	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, arsip dan Pengolahan Data
			2. Meningkatkan pengaturan dalam bentuk perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan gratis bagi SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat	Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	Belum ada	Adanya Perda pendidikan	1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib	Dinas Pendidikan
			3. Meningkatkan kualitas lulusan dengan cara pemberian beasiswa untuk siswa SMU/ sederajat yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi	Meningkatnya kualitas lulusan SMU/ sederajat	Cukup baik	Meningkat signifikan	1. Program Pendidikan Menengah	Wajib	Dinas Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			4. Penempatan lokasi dan bidang praktek kerja siswa SMK ke tempat-tempat yang mendukung peningkatan kualitas lulusan	Meningkatnya kualitas lulusan SMK	Cukup baik	Meningkat signifikan	1. Program pendidikan menengah  2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib  Wajib	Dinas Pendidikan
			5. Pendirian perguruan tinggi bidang ilmu yang relevan dengan potensi di Tanjung Jabung Timur	Berdirinya perguruan tinggi	-	Adanya Perguruan Tinggi	1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib	Dinas Pendidikan
			6. Menyiapkan tenaga profesional yang berasal dari Tanjabtim untuk pendidikan Diploma III Perikanan	Adanya tenaga profesional D-III ilmu perikanan	Belum ada	12 Orang	1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan:  2. Pendanaan pendidikan bagi generasi muda dengan keahlian bidang perikanan	Wajib	Dinas Pendidikan
			7. Pemberian beasiswa berkelanjutan untuk keluarga tidak mampu namun berprestasi untuk	Meningkatnya jumlah mahasiswa S1, S2, dan S3 yang berasal dari Tanjabtim	Terbatas	Meningkat signifikan	1. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Wajib	Dinas Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3				2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib	
			8. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan	penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	24%	95%	1. Program Wajib Belajar 9 tahun untuk masyarakat miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat	Wajib	Dinas Pendidikan dan Dinsosnakertrans
							2. Program Pendidikan Menengah bagi masyarakat miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat	Wajib	
				masyarakat tidak mampun/korban bencana mendapat akses mengikuti pendidikan	-	100%	3. Program pembinaan penyandang cacat	Wajib	
	2. Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	1. Menyiapkan SDM yang terampil yang siap bekerja, untuk itu Balai	1. Peningkatan kualitas fasilitas pelatihan modern dan instruktur yang berkualitas di BLK	Berfungsinya BLK	BLK Belum Berfungsi	BLK berfungsi optimal	1. Program Pendidikan Non-Formal	Wajib	Dinas Pendidikan dan Dinsosnakertrans

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		Latihan Kerja (BLK) akan dilengkapi dengan sarana fasilitas pelatihan yang modern dan memadai.	2. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat penyandang cacat untuk mengikuti khursus di BLK				1. Program pendidikan non formal  2. Program pendidikan luar biasa	Wajib  Wajib	Dinas Pendidikan dan Dinsosnakertrans

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
MISI III : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dengan Penempatan SDM Profesional.									
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.	1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	1. Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi daerah	1. Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	57,00%	85,00%	1. Program Pendidikan Kedinasan	Wajib	BKD
							2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Wajib	BKD
							3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Wajib	BKD dan Satpol PP, Sekda, Bappeda
							1. program penataan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	Wajib	Sekda
							1. program penyusunan dan penyempurnaan tupoksi perangkat daerah	Wajib	Sekda
							1 program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Wajib	Sekda



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	Terbatas	100% hasil pengawasan ditindaklanjuti	1. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Wajib	BKD, Inspektorat
				Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas intern	Terbatas	Meningkat 50% dari tahun 2011	1. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Wajib	Inspektorat
							1. peningkatan pengelolaan arsip dilingkungan pemerintah kabupaten		Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, arsip dan Pengolahan Data
	2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	1. Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	1. Penyempurnaan secara terus menerus implementasi <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	Konvensional dan semi elektronik	Sistem keuangan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Wajib	DPKAD
			2. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan anggaran berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i> .						

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	3. Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	1. Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan potensi dan kemampuan	1. Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan wilayah sangat terpencil, terpencil dan tidak terpencil.	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	Terbatas	Terlaksananya penataan wilayah	1. Program penataan daerah otonomi baru 2. program penataan otonomi daerah 3. program penguatan otonomi desa	Wajib	BPMPD/K, Bappeda, Sekda  Sekda  BPMPDK
		2. Peningkatan pelayanan terpadu kecamatan	1. Menetapkan kecamatan berbasis pelayanan terpadu melalui peraturan kepala daerah	Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	Ada	Meningkat	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2. program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Wajib	BKD dan Satpol PP, BPMPDK, Sekda  Satpol PP, Badan Kesbangpollinmas
	4. Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	1. Penerimaan CPNS berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah	1. Penerimaan CPNS dengan memprioritaskan calon yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Adanya Prioritas Calon CPNS	Tidak ada Prioritas	Terealisasi	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	Wajib	BKD
		2. Melakukan evaluasi kebutuhan berdasarkan beban kerja untuk mengetahui	1. Formasi CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	-	Terealisasi	1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Wajib	Semua SKPD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		formasi CPNS setiap tahun							
		3. Pelaksanaan rekrutmen CPNS yang didasarkan pada kebutuhan beban kerja dan bebas KKN	1. Sistem recruitment CPNS yang bebas KKN	CPNS yang bebas KKN	-	Terlaksana	1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Wajib	BKD
	5. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1. Peningkatan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) untuk meningkatkan kinerja pegawai daerah, insentif guru PNS dan Non PNS, Honorer Daerah dan pejabat pemerintahan sampai ke tingkat RT)	1. TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil - terpencil - tidak terpencil)	TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil - terpencil - tidak terpencil)	Akan dilaksanakan mulai tahun 2011	Meningkat	1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Wajib	BKD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Peningkatan insentif untuk guru PNS dan Non PNS daerah terpencil	1. Isentif Guru ditingkatkan sesuai dengan kemampuan daerah	Isentif Guru meningkat	Ada	Meningkat	1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Wajib	BKD, Dinas Pendidikan
	6. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	1. Pemberian insentif untuk pegawai SARA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	1. Pemberian insentif bagi pegawai SARA di setiap desa/kelurahan	Insentif Pegawai SARA meningkat	Ada	Meningkat	1. Program peningkatan iman dan taqwa.	Wajib	Sekda
		2. Pemberian penghargaan kepada pegawai SARA teladan	1. Pemberian penghargaan bagi pegawai SARA teladan di setiap desa/kelurahan	Penghargaan bagi Pegawai SARA	Ada	Meningkat	1. Program peningkatan iman dan taqwa.	Wajib	Sekda
	7. Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	1. Pembentukan Perda tentang pelayanan publik	1. Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	Belum ada	Adanya PERDA	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Wajib	Sekda, DPKAD
		2. Penguatan lembaga pelayanan terpadu satu pintu/Kantor Pelayanan	1. KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan public	Berfungsi belum optimal	Optimalnya fungsi KPPT	1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Wajib	KPPT

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		Perizinan Terpadu (KPPT)	2. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan terpadu	Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan terpadu	Meningkat 17% pertahun	PAD meningkat 100% dari tahun 2011	1. Prgram optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  2. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah		KPPT
		3. Membangun sistem komputerisasi e-KTP	1. Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten	Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Belum E-KTP	e-KTP terlaksana dengan optimal	1. Program penataan administrasi kependudukan  2. Program penataan administrasi kependudukan	Wajib	Dinas Dukcapil
		4. Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Pengembangan e-Government	Pengembangan sistem jaringan e-government	Kapasitas jaringan 4 MBps	Kapasitas jaringan 10 MBps	1. Pengembangan e-Government	Wajib	Bappeda, Pengolah Data
				Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	Sistem aplikasi belum terintegrasi dengan jaringan e-government	Terintegrasinya sistem aplikasi terutama bidang perencanaan dan anggaran	1. Program pengembangan data dan informasi		Bappeda, Pengolah Data
				Sistem informasi daerah berbasis website	Baru tersedia layanan website pemerintah kabupaten	75% SKPD telah memiliki website sebagai layanan Informasi	1. Porgram optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Semua SKPD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							2. Program pengembangan komunikasi, informasi, dokumentasi dan media massa	Wajib	Sekda
							3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Wajib	Dishubkominfo
							4. Program Kerjasama Informasi dan Mas media	Wajib	Dishubkominfo
							5 program pengembangan data/informasi/statistik daerah		Dinas Kelautan dan Perikanan
		5. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1. Pelayanan publik bebas dari KKN	Pelayanan publik bebas dari KKN	-	Terlaksana	1. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Wajib	Inspektorat
							1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Wajib	Sekda, Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							1. program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Wajib	Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
MISI IV : Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan, Pariwisata dan Sektor Jasa Lainnya									
Meningkatkan roda perekonomian masyarakat dan struktur ekonomi yang kokoh yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	1. Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik	1. Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik	Pelayanan satu pintu	29 Jenis	40 Jenis	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Wajib	Disperindag
			2. Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap daerah lingkup Kabupaten Tanjab Timur	Nilai Investasi (Rp)	12.252 Juta	26.746 Juta	1. Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Wajib	Bappeda
							1. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Wajib	Bappeda
							1. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Wajib	KPPT
							1. Program peningkatan promosi dan kerjasama daerah		KPPT



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	2. Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	1. Tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata	1. Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi	Nilai Ekspor		Meningkat signifikan	1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pilihan	Disperindag
				Nilai Impor		Meningkat untuk barang modal	1. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Ekspor dan Importir Daerah	Pilihan	Disperindag
							2. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Pilihan	Disperindag
							3. Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Pilihan	Disperindag
			2. Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,78%	7,11%	1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pilihan	Disperindag
				Laju inflasi	10,52	5,53	1. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Pilihan	Disperindag
				PDRB atas harga berlaku	11,747 juta	15,95 juta	1. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Pilihan	Disperindag, DKP, Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian Tanaman Pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							1. program peningkatan kebijakan dan manajemen	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
			3. Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan IPTEK	Jumlah Sentra industri kecil	4	18 Sentra	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pilihan	Disperindag
				Nilai Produksi industri (IKM) (Rp)	-	12.000.000.000	1. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2. Program penataan struktur industri	Pilihan Pilihan	Disperindag Disperindag
	3. Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	1. Operasionalisasi dan permodalan BUMD dengan mitra strategis	1. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	Tidak ada	Meningkat	1. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Wajib	Bappeda
			2. Penguatan LKMP melalui bantuan kredit modal kerja	Kantaya LKPM	Terbatas	Meningkat	1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Pilihan	Dinas Koperasi UMKM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							2. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Pilihan	Dinas Koperasi UMKM
							3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Pilihan	Dinas Koperasi UMKM
	4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	1. Menciptakan Pemenuhan Kecukupan pangan daerah	1. Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau	persentase kecukupan pangan		100%	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pilihan	BP4K, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			2. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan	desa ketahanan pangan	93 Desa/kel rawan pangan	20 Desa Mandiri Pangan	1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pilihan	BP4K, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun
			3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat	Lembaga distribusi pangan masyarakat	-	15 Desa Lumbung Pangan	1. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Pilihan	BP4K, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PU
			4. Peningkatan sistem kewaspadaan dini gizi dan pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	93 Desa/kel rawan pangan	50% desa bebas rawan pangan	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pilihan	Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Meningkatnya produktivitas usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas	1. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi				1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Wajib	Dinas Dinas Sosnakertrans
			2. Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif	Jumlah UKM	295 unit	390 unit	1. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pilihan	Dinas Koperasi UMKM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			3. Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM	Jumlah/UKM yang berperan	295 unit	390 unit	1. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pilihan	Dinas Koperasi UMKM
			4. Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	10 orang/unit	30 orang/unit	1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Pilihan	Dinas Koperasi UMKM
			5. Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif	UKM Unggulan	20 unit	75 unit	1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Pilihan	Dinas Koperasi UMKM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			6. Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha	Akses masyarakat terhadap sumber daya	Terbatas	meningkat	1. Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Pilihan	Dinas Koperasi UMKM
			7. Pengembangan koperasi yang handal	Jumlah koperasi handal	38 unit	76 unit	1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Pilihan	Dinas Koperasi UMKM
			8. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di perdesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas suplai berbasis sumber daya lokal	Produk Unggulan	2 jenis	13 jenis	1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun, Dinas Peternakan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM
	5. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	1. Terselenggaranya upaya-upaya untuk penurunan tingkat pengangguran	1. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi	Jumlah TK yg terserap	Terbatas	300 orang	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan	Wajib	Dinas Sosnakertrans

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			2. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja	UMR	Rp.900.000,-	Rp 1.500.000	1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Wajib	Dinas Sosnakertrans
			3. Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja	Jumlah Pelatihan	Terbatas	13 Kali jumlah peserta 325 orang	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Wajib	Dinas Sosnakertrans
							1. program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan pmks	Wajib	Dinas Sosnakertrans
	6. Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui	1. Menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sumber	1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata,	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk	belum tersedia paket wisata dari biro jasa perjalanan	tersedia biro jasa perjalanan wisata di Tanjung Jabung	1. Program Pengembangan Kemitraan.	Pilihan	Disbudparpora



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	promosi	pendapatan daerah	baik di dalam maupun di luar negeri	paket wisata di Tanjung Jabung Timur	wisata	Timur	2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	Pilihan	Disbudparpora
							3. Program Pengembangan destinasi Pariwisata	Pilihan	Disbudparpora
			2. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi	keterpaduan sistem jaringan moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	belum ada sinergitas sarana moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	adanya sinergitas sarana moda transportasi untuk pelayanan kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur	1. Program pengembangan pemasaran pariwisata.	Pilihan	Disbudparpora
							2. Program pengelolaan kekayaan budaya.	Pilihan	Disbudparpora
			3. Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha dan masyarakat	keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	belum optimalnya pengelolaan objek wisata di Tanjung Jabung Timur	kawasan wisata bahari, wisata budaya dan wisata religi yang memenuhi standar	3. Program pengelolaan keragaman budaya.	Pilihan	Disbudparpora
							1. Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata	Pilihan	Disbudparpora
							2. Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata	Pilihan	Disbudparpora

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	7. Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	1. Menjadikan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.	1. Pembangunan pertanian diarah pada pemanfaatan lahan berdasarkan potensi agronomis sehingga menjamin produktifitas lahan dan kepentingan strategis	Potensi Lahan	56.919 Ha	53.739 Ha	1. Program ketahanan pangan	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun
							1. Program peningkatan kesejahteraan petani		Dinas Peternakan, BP4K
			2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan terutama pada ke fungsi penggunaan lain terutama pada kawasan yang secara agronomis sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan	Luas lahan pertanian tanaman pangan	31.005 Ha	33.120 ha	1. Program pemberdayaan petani 2. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian 3. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Pilihan  Pilihan  Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BP4K

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			3. Memberikan bantuan fasilitas dan peralatan produksi pertanian, permodalan, subsidi, kompensasi dan regulasi yang memihak petani tanaman pangan	Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	Benih Padi 16.000 Ha,	Benih Padi 22.000 Ha	1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 2. Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan SDM	Pilihan  Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
			4. Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau	Penguatan Kelompok Tani	1.119 Kelompok Tani, 93 Gapoktan	Kelompok Tani, Gapoktan 93	1. Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BP4K
					BDK 154 Pemula 263  Lanjut 216 Madya 117 Utama 9	BDK 154 Pemula 26  Lanjut 237 Madya 315 Utama 18	1. Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perindag
							1. program peningkatan produksi pertanian		Dinas Pertanian Tanaman Pangan
		2. Peningkatan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan	1. Penguatan kemampuan teknis budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,	Produksi Padi	108,052 (ton)	127.154 (ton)	1. Produksi hasil Pertanian Tanaman Pangan	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, BP4K
				Produksi Jagung	5.400 (ton)	6.386 (ton)	1. Peningkatan produksi hasil peternakan.	Pilihan	
				Jumlah Sapi (ekor)	12.629 ekor	17.000 ekor			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		perikanan, penerapan teknologi tepat guna.	peningkatan kemampuan manajerial dan penguatan daya saing serta posisi tawar petani	Jumlah Kambing (ekor)	24.156 ekor	29000 ekor	1. Penerapan Teknologi pertanian Tanaman Pangan	Pilihan	
				Jumlah kerbau (ekor)	495 Ekor	550 Ekor			
				Jumlah domba (ekor)	140 Ekor	550 Ekor			
							1. program pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana		Dinas Peternakan
							1. program pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian		BP4K
							1. program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		BP4K

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		3. Peningkatan efisiensi, daya saing modernisasi serta nilai tambah komoditi tanaman pangan terutama padi, perkebunan dan kelautan	1. Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial petani, peternak dan nelayan dilakukan melalui peningkatan kemampuan berorganisasi secara partisipatif.	Lembaga ekonomi mikro	3 Unit	11 Unit	1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pilihan	DKP
			2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	295 KM	320 KM	1. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan / perkebunan	Pilihan	BP4K
				Terpenuhi sarana prasarana pertanian	belum terpenuhi merata	terpenuhi Relatif merata	1. Pengembangan sumberdaya sarana prasarana pertanian	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
				Pencegahan penularan penyakit ternak	masih belum baik penanganan penyakit ternak	penanganan penyakit ternak dengan baik	1. Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	Pilihan	Dinas Peternakan
				fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	pasar hewan belum optimal	pasar hewan yang representatif	1. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pilihan	Dinas Peternakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		4. Peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak dan air tawar serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai	1. Peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam penangkapan ikan laut				2. Peningkatan Produksi Perkebunan	Pilihan	Dinas Hutbun
							3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pilihan	Disperindag
				Ikan Laut (ton)	23.625 Ton	40.500 Ton	1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pilihan	DKP
				Ikan Perairan Umum (ton)	627,8 ton	1.148 ton	1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pilihan	DKP
				Ikan Kolam (ton)	195 ton	853 ton	1. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian	Pilihan	
							1. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pilihan	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			3. Peningkatan sarana dan prasarana nelayan melalui pemberian bantuan pompong dan perlengkapan alat tangkap	penurunan angka kemiskinan dari kantong kemiskinan di nelayan dengan bantuan pompong	0 unit	2.000 unit	1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Pilihan	DKP
	8. Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	1. Pembangunan sektor Migas dan Bahan Tambang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan	1. Pengelolaan migas dan bahan tambang harus diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari secara ekonomi, sosial dan ekologi	Sumbangan pertambangan ke PAD (Galian C)	Rp589.459.560	Rp1.100.131.000	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan  2. Program pengembangan dan rekayasa sumber daya mineral  3. Program pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Pilihan  Pilihan  Pilihan	Dinas ESDM, DPKAD
		2. Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan melibatkan masyarakat	1. Pembangunan dan pengelolaan migas dan bahan tambang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Implementasi CSR)	Bantuan Listrik 600 RT, Ternak 47 ekor, Jalan dan jembatan	Bantuan listrik 900 RT, Ternak 250 Ekor, Jalan dan jembatan	1. Program Pendampingan Community Social Responsibility	Pilihan	Sekda, Bappeda, Dinas ESDM, Dinas PU, Dinas Peternakan, Dinas Hutbun, Dinas Pertanian Tanaman Pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			terutama yang berada disekitar kawasan pengelolaan				1. program pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja	Wajib	Dinas Sosnakertrans
		3. Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan memperhatikan dan memperhitungkan kerusakan lingkungan dan fasilitas umum seperti infrastruktur sebagai bagian dari biaya produksi pengelolaan	1. Membuat kebijakan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhitungkan dampak-dampak terhadap lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung	Peraturan tentang pengelolaan SDA	1 SK Bupati, Perbup ttg Limbah B3	Perda ttg minerba, Perda ttg air bawah tanah	1. Program Pengembangan sumberdaya mineral	Pilihan	Dinas ESDM
			2. Membangun kesadaran semua pengelola sumberdaya alam migas dan bahan tambang akan dampak yang bisa timbul dari kegiatan eksploitasi dan transportasi hasil pengelolaan.	Jumlah penyuluhan utk kesadaran	Frekuensi 12 kali setahun utk 3 persh, dan 7 kelompok penambang pasir	Frrekuensi 24 kali utk jlh persh yg lebih banyak	1. Program Pengembangan sumberdaya mineral	Pilihan	Dinas ESDM, Kantor LH
							1. program pengembangan penyuluh kelautan dan perikanan		DKP
							1 program pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Wajib	BPMPDK



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		4. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara bijaksana untuk meminimalkan dampak lingkungan dan bencana alam	1. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana	Tingkat pencemaran lingkungan	Adanya Kerusakan Lingkungan	Meminimalir tingkat pencemaran lingkungan dan yang diakibatkan dari fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Wajib	Kantor LH
				Kerusakan lingkungan					
				Bencana alam akibat pengelolaan SDA					
							1. Program penelitian dan pengembangan	Wajib	Kantor LITBANGDA
			2. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup	Sosialisasi	8 Kali setahun	11 Kali per kecamatan	1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	Wajib	Badan Kesbangpollinmas
							2. Program pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program dan kegiatan	Wajib	Badan Kesbangpollinmas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	1. Menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang berdaya saing	1. Pengembangan wilayah pertumbuhan ekonomi di kecamatan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	belum ada kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	adanya kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di setiap ibukota kecamatan	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Wajib	BPMPD/K
			2. Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya	penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	belum adanya BUMDes	pendirian BUMDes sebanyak 50% dari jumlah desa yang ada	1. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Wajib	BPMPD/K
							1. program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Wajib	Dinas Sosnakertrans
							1. program pengawasan ketenagakerjaan	Wajib	Dinas Sosnakertrans
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	70%	100%	1. Program perencanaan pembangunan daerah		Bappeda
							2. Program perencanaan sosial budaya		Bappeda
							3. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan LH		Bappeda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							4. Program perencanaan pengembangan pemanfaatan ruang  5. Program perencanaan pengembangan kota menengah dan besar		Bappeda  Bappeda
							1. program pengembangan sarana dan prasarana pemukiman dan lingkungan desa/kelurahan	Wajib	BPMPDK
				Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	partisipasi masyarakat rendah	peningkatan partisipasi masyarakat desa	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Wajib	BPMPD/K
				Kapasitas Aparatur Desa	kapasitas aparatur belum optimal	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Wajib	BPMPD/K
				Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	Belum optimal peran perempuan dalam membangun desa	Peningkatan peran peran perempuan di desa	1. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan		BPMPD/K, BPPKB

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Kawasan Kota Mandiri Terpadu	belum optimalnya pengelolaan KTM Kota Baru Geragai	Optmalisasi Kawasan Kota Mandiri Terpadu Kota Baru Geragai	2 Program pengembangan wilayah transmigrasi	Wajib	Dinas Sosnakertrans

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			PENANGGUNGJAWAB
MISI V : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat									
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sehat, produktif dan berdaya saing	1. Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	1. Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan	1. Memenuhi kebutuhan infratraktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil	Jumlah Puskesmas	17	20	1. Program upaya kesehatan masyarakat	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
				Jumlah Puskesmas Pembantu	61	75	1. Program standarisasi pelayanan kesehatan	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
							1. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
							1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
							1. program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Wajib	RSUD Nurdin Hamzah
							1. program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		RSUD Nurdin Hamzah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			2. Memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cukup	Memenuhi Standar	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Wajib	Dinas Kesehatan
	2. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	1. Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.	1. Memenuhi rasio tenaga kesehatan yang memadai sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.	Jumlah Dokter	33	51	1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
				Jumlah Bidan	127	220			
				Jumlah Perawat	136	220			
		2. Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil	1. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dilakukan secara simultan terutama memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di perdesaan dan wilayah terpencil	Jumlah Dokter per Puskesmas	1,94	2-3/puskemas : 1-2 dokter umum/spesialis + 1 dokter gigi	1. Program standarisasi pelayanan kesehatan	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
				Rasio penduduk dengan Bidan	1683.31 (tahun 2009)	1000			
				Rasio penduduk dengan Perawat	1571.92 (2009)	1000			
	3. Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang	1. Pendayagunaan sumberdaya yang ada baik berupa fasilitas	1. Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas	Indeks pembangunan Manusia	71,17 (2009)	74,3	1. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Wajib	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	infrastruktur kesehatan, perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan yang efektif	pembantu pada masing-masing kecamatan dan desa				2. Program upaya kesehatan masyarakat  3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya  4. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat  5. Program Perbaikan Gizi masyarakat  6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat  7. Program pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	Wajib  Wajib  Wajib  Wajib  Wajib	
							8. Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Wajib	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	4. Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	1. Pemberiaan pelayanan yang maksimal bagi keluarga untuk menjadi Keluarga andalan	1. Pembinaan masyarakat pada progarm keluarga berencana				9 Prog. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan	Wajib	BPPKB dan Dinas Kesehatan
							10 Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Wajib	
							11 Program Pengembangan Kesehatan	Wajib	
				cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 taun sebesar 3,5%	Terbatas	100%	1. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam program KB/KR mandiri.	Wajib	
				Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	Terbatas	100%	1. Program keluarga berencana 2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	Wajib	
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	-	100%	1 Program promosi kesehatan ibu	Wajib	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	-	100%		Wajib	
				Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	-	100%		Wajib	
				2. Pelayanan Kontrasepsi	-	100%	1. Program keluarga berencana	Wajib	
							2. Program kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Wajib	
			3. Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga miskin	RTS-Miskin	6382 Rumah Tangga	3.191 Rumah Tangga	3. Program pelayanan kontrasepsi	Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
							1. Program upaya kesehatan masyarakat	Wajib	
		2. Pendampingan dan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak	1. Pendampingan pelayanan kesehatan keluarga dan anak	Kesehatan ibu dan anak	AKB 28,31/1.000 klh	AKB 23 /1.000 klh	1. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak.	Wajib	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							2. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Wajib	
			2. Perlindungan bagi Perempuan dan Anak	advokasi perlindungan perempuan dan anak	-	penurunan kasus pelecehan seksual dan trafficking	1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	Wajib	BPPKB, Sekda
							2. Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Wajib	
							3. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	Wajib	
	5.						1. program peningkatan sistem informasi kesehatan	Wajib	RSUD Nurdin Hamzah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			PENANGGUNGJAWAB
MISI VI : Memfasilitasi Percepatan Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat									
Menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan	1. Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	1. Pemetaan sengketa lahan yang melibatkan pengusaha dan masyarakat	1. Kejelasan posisi para pihak dalam sengketa lahan	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	-	penyelesaian kasus sengketa lahan secara persuasif	1. Program kerjasama informasi dan media massa.	Wajib	Sekda, BPN
			2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	Sosialisasi Terbatas	10 kali pelaksanaan sosialisasi tentang pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan	1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Wajib	Sekda, BPN
	2. Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	1. Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan secara musyawarah dan damai	1. Terbentuknya lembaga penyelesaian sengketa lahan	kelembagan yang kapabel	Peran Institusi Terbatas	penguatan peran institusi yang menangani penyelesaian sengketa lahan	1. Program pemberdayaan dalam penyelesaian konflik	Wajib	Sekda, BPN
			2. Terbentuknya kesepakatan bersama tentang	tatacara penyelesaian sengketa lahan	-	peraturan yang mengatur tentang	1. Program pemberdayaan masyarakat	Wajib	Sekda, BPN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			mekanisme dan tata cara			mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	2. Program penataan aturan	Wajib	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				
MISI VII : Meningkatkan Penataan Zonasi dan Perlindungan Terhadap Kawasan Konservasi, Peninggalan Budaya Situs dan Pengembangan Budaya Tradisional.										
Mewujudkan penataan zona dan melestarikan kawasan perlindungan situs budaya tradisional sebagai pusat penelitian budaya, wisata budaya dan warisan budaya	1. Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	1. Penyampaian informasi dan pemberian pemahaman para pihak tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	1. Terciptanya penataan sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	Sistem informasi kawasan konservasi peningggal situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	belum tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	tersedia sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional di kecamatan yang memiliki potensi tersebut	1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.  2. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup.  3. Program peningkatan pengendalian polusi.  4. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan	Pilihan  Wajib  Wajib  Pilihan	Kantor LH  Kantor LH,  Kantor LH  Dinas Hutbun, Bappeda	
			2. Pemetaan zonasi kawasan konservasi	Jelasnya zonasi	belum adanya RTRW dan zonasi kawasan konservasi	dokumen RTRW yang mengatur zonasi kawasan konservasi	1. Program Penataan Kawasan	Wajib	Bappeda, Dinas Hutbun, Sekda, BKSDA TNB, Kantor LH	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
					belum adanya pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau dan sumberdaya air	dokumen pengembangan, pengelolaan kawasan sungai, danau dan sumberdaya air berbasis DAS	1. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Wajib	Bappeda, Sekda, Dinas Hutbun, BKSDA TNB, Kantor LH
					-	Penurunan laju deforestry dan degradasi lahan	1. Program Rehabilitasi hutan dan lahan 2. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	Pilihan  Pilihan	Dinas Hutbun
			3. Tindakan tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan konservasi dan kawasan perlindungan	Pengamanan Kawasan Konservasi	pengamanan kawasan konservasi belum optimal	pengamanan kawasan konservasi secara optimal dengan target TNB, Hutan Lindung, Cagar alam	1. Program hukum	Pilihan	Dinas Hutbun, BKSDA TNB, Polres.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	2. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	1. Fasilitasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatkan sikap dan tindakan positif para pihak untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup setiap tahun	partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Terbatas	50 kali sosialisasi di desa sekitar kawasan konservasi	1. Program pemberdayaan masyarakat	Pilihan	Dinas Hutbun
	3. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	1. Memotivasi masyarakat untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1. Meningkatnya motivasi para pihak untuk menjaga lingkungan	pelestarian hutan dan lahan	Terbatas	meningkatnya reboisasi hutan dan lahan	1. Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	Pilihan	Dinas Hutbun
							1. program pembinaan kawasan hutan		Dinas Hutbun
				pelestarian hutan dan lahan	Terbatas	meningkatnya keberlanjutan pelestarian hutan dan lahan	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pilihan	ESDM, Bagian SDA
				masyarakat peduli lingkungan	Terbatas	peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi	1. Pemberdayaan masyarakat	Wajib	Sekda, Dinas Hutbun

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							1. Alternatif sumber-sumber ekonomi masyarakat		Sekda, Dinas Hutbun
		2. Menindak setiap pelaku yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1. Meningkatnya sikap tegas pemerintah daerah untuk penerapan sanksi kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup	pelanggar hukum	-	Menurun 50% dari tahun 2011	1. Program Pengendalian dan Pengrusakan Lingkungan	Wajib	Kantor LH
							1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pilihan	Dinas Hutbun
							1. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		DKP



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB				
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR							
MISI VIII : Mewujudkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya yang Dinamis serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi													
Mewujudkan keselarasan, kedamaian, ketentraman dan jalinan persaudaraan antar umat beragama, antar suku, antar golongan masyarakat	1.	Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	1.	Penyiapan bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana	1.	Pemberian santunan bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	-	Sehingga terlaksananya korban jiwa akibat bencana yang terjadi berkurang	1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Wajib	Dinas Sosnakertrans
						Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	Insidentil	10.286 orang	1	Santunan kematian	Wajib	Badan Kesbangpolinmas, Sekda	
	2.	Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	1.	Adanya sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT.	1.	Sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT oleh aparat yang berwenang dengan melibatkan tokoh masyarakat.	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	belum optimal dukungan pemerintah untuk kegiatan keagamaan	ketentraman dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.	Program Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Pemuda	Wajib	Sekda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Peningkatan dan pembinaan generasi muda bidang keagamaan	1. Pembinaan generasi muda melalui lembaga keagamaan	Meningkatnya pembinaan generasi muda melalui lembaga keagamaan	-	keberdayaan organisasi pemuda dan lembaga keagamaan di tiap kecamatan	1. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Wajib	Sekda
	3. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	1. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku budaya yang ada di daerah	1. Pelestarian kesenian tradisional	Cakupan kajian seni 50%	-	100%	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	Pilihan	Dinas Budparpora
			2. Terwujudnya pengembangan wisata bahari dan wisata religi	Meningkatnya kunjungan wisata 25%	-	100%	1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Program Pengelolaan keragaman budaya	Pilihan Pilihan	Dinas Budparpora
	4. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	1. Adanya fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	1. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	Terbatas	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan meningkat	1. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Wajib	Sekda, BPMPD/K, Dinas Budparpora
							1. program pembinaan eks penderita penyakit sosial		Sekda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							1. program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Dinas Budparpora
			2. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Terbatas	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan:	Wajib	BPP&KB
	5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyampaian aspirasi secara demokratis	1. Penyiapan media penyaluran aspirasi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara demokratis	Terbatas	Meningkatnya iklim demokrasi di masyarakat	1. Program pendidikan politik masyarakat 2. program pengembangan wawasan kebangsaan 3. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Wajib  Wajib  Wajib	Badan Kesbangpolinmas  Badan Kesbangpolinmas  Badan Kesbangpolinmas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
							4. program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Wajib	Badan Kesbangpolinmas
							5. program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Wajib	Sekretariat DPRD
	6. Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jenis dan jumlah Kegiatan	Terbatas	Kualitas Pelayanan bagi Penyandang cacat, lansia, Pakir Miskin meningkat	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Wajib	Dinas Sosnakertrans
			2. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial	menurunnya angka anak terlantar pertahun	-	Penurunan jumlah anak terlantar sebesar 50% dari jumlah anak terlantar yang ada	1. Program pembinaan anak terlantar	Wajib	Dinas Sosnakertrans

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			3. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial	para penyandang cacat di seluruh kecamatan	pendataan penyandang cacat yang belum optimal	Terlayannya para penyandang cacat dan trauma pada seluruh kecamatan	1. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Wajib	Dinas Sosnakertrans
			4. Meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	-	terbina eks penyandang penyakit sosial sebesar 75% dari jumlah yang ada	1. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Wajib	Dinas Sosnakertrans
			5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak	Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar	-	Penurunan jumlah anak terlantar sebesar 50% dari jumlah anak terlantar yang ada	1. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3. Program pembinaan anak terlantar	Wajib  Wajib  Wajib	Dinas Sosnakertrans  Dinas Sosnakertrans  Dinas Sosnakertrans

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			PENANGGUNGJAWAB	
MISI IX : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Setiap Kecamatan dan Pembinaan Atlit Untuk Berprestasi										
Menyediakan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlit untuk berprestasi sebagai media menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan	1. Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	1. Meningkatnya ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	1. Pengembangan fasilitas olah raga berkualitas di setiap kecamatan	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	Terbatas	100%	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pilihan	Dinas Budparpora	
	2. Penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	1. Adanya pembinaan atlit sejak dini, berkala dan berkelanjutan	1. Pembinaan generasi muda sejak dini untuk menjadi atlit sesuai dengan minat dan bakat	Atlit Berprestasi terbinas sejak usia dini	-	adanya pembinaan	1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pilihan	Dinas Budparpora	
	3. Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	1. Pemberian penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi.	1. Penyiapan anggaran bagi atlit daerah yang berprestasi sesuai dengan keuangan daerah	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlit berprestasi	Tidak Tersedia	Tersedia	1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pilihan	Dinas Budparpora	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	4. Pengembangan dan pendidikan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	1. Memfasilitasi pengembangan dan pendidikan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional	1. Pembinaan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	-	100%	1. Program peningkatan iman dan taqwa.	Wajib	Sekda